

## Politik Subsidi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Sistematis atas Kebijakan Ekonomi Populis di Negara Berkembang

<sup>1</sup>Tri Rahayu, <sup>2</sup>Ranti Delima Tobing, <sup>3</sup>Ogin Syaputra Sinaga, <sup>4</sup>Brigita Zai, <sup>5</sup>Natalia Tan, <sup>6</sup>Nadia Vega Surbakti  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan

E-mail: <sup>1</sup>[trirahayu20171@gmail.com](mailto:trirahayu20171@gmail.com), <sup>2</sup>[rantidelima493@gmail.com](mailto:rantidelima493@gmail.com),  
<sup>3</sup>[oginsyaputras@gmail.com](mailto:oginsyaputras@gmail.com), <sup>4</sup>[brigitazai2005@gmail.com](mailto:brigitazai2005@gmail.com), <sup>5</sup>[nataliaatan5@gmail.com](mailto:nataliaatan5@gmail.com),  
<sup>6</sup>[nadiavegasurbakti@gmail.com](mailto:nadiavegasurbakti@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik dalam kebijakan subsidi dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial di negara berkembang, khususnya Indonesia. Melalui pendekatan systematic literature review, studi ini mengkaji berbagai penelitian terkait ekonomi politik subsidi yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Data dikumpulkan dari berbagai basis data akademik yang terpercaya dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan content analysis untuk mengidentifikasi pola utama, tren, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi subsidi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun subsidi dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan, praktiknya sering kali memperkuat struktur ketimpangan sosial dan ekonomi akibat adanya politicasi dan distribusi manfaat yang tidak merata. Faktor politik, seperti kepentingan elektoral dan kekuasaan politik, sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan subsidi yang cenderung bersifat populis dan tidak berkelanjutan. Selain itu, kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran dan kurang transparan menyebabkan sumber daya publik tidak optimal dan sering dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan berbasis data yang akurat dan kolaborasi multi-sektoral untuk mencapai distribusi manfaat yang lebih adil dan efektif.

**Kata kunci :** kebijakan subsidi, politik ekonomi, ketimpangan sosial, negara berkembang, Indonesia

### ABSTRACT

This study aims to analyze the role of politics in subsidy policies and their impact on social inequality in developing countries, particularly Indonesia. Through a systematic literature review approach, this study examines various studies related to the political economy of subsidies published between 2021 and 2025. Data was collected from various reliable academic databases and analyzed using thematic analysis and content analysis methods to identify key patterns, trends, and political factors that influence subsidy implementation. The findings show that although subsidies are designed to improve social welfare and reduce inequality, in practice they often reinforce social and economic inequality due to politicization and uneven distribution of benefits. Political factors, such as electoral interests and political power, greatly influence the determination of subsidy policies, which tend to be populist and unsustainable. In addition, subsidies that are not targeted appropriately and lack transparency result in suboptimal use of public resources, which are often enjoyed by the upper-middle class. The study recommends the need for data-driven policy reform and multi-sectoral collaboration to achieve a more equitable and effective distribution of benefits.

**Keyword :** subsidy policy, economic policy, social inequality, developing countries, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, kebijakan subsidi kembali menjadi instrumen politik yang menonjol di banyak negara berkembang. Pemerintah sering menggunakan subsidi energi, pangan, atau transportasi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperoleh legitimasi politik. Fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik ekonomi populis yang berupaya menampilkan kedekatan dengan rakyat melalui intervensi negara yang bersifat langsung terhadap harga dan konsumsi masyarakat. Meskipun pada tataran politik subsidi tampak sebagai kebijakan pro-rakyat, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasinya sering kali justru memperdalam ketimpangan sosial dan memperburuk alokasi sumber daya publik.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan subsidi masih menjadi alat politik yang strategis. Subsidi kerap dikaitkan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat miskin, tetapi pada praktiknya sebagian besar penerima manfaat justru berasal dari kelompok menengah ke atas. Ketimpangan dalam distribusi manfaat ini menimbulkan paradoks: kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan justru memperkuat struktur ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, dinamika politik elektoral sering kali mendorong pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada efisiensi ekonomi, melainkan pada kalkulasi elektabilitas jangka pendek.

Secara akademik, banyak penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas ekonomi subsidi seperti pengaruhnya terhadap inflasi, harga

energi, dan defisit fiskal, namun sedikit yang menelaah dimensi politik dan sosialnya secara sistematis. Riset mengenai *political economy of subsidies* masih terfragmentasi: sebagian besar menyoroti aspek fiskal, sementara dimensi keadilan sosial, persepsi publik, dan dampak redistributif belum terintegrasi dalam analisis yang komprehensif. Di sinilah letak *gap riset* yang ingin diisi oleh kajian ini, yaitu dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap hubungan antara politik subsidi dan ketimpangan sosial dalam konteks negara berkembang.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis ekonomi populis dengan kerangka distribusi kesejahteraan sosial, sehingga tidak hanya menilai subsidi dari sisi kebijakan fiskal, tetapi juga dari sisi legitimasi politik dan dampak sosial jangka panjang. Pendekatan sistematis memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan konsekuensi kebijakan subsidi dalam berbagai konteks negara berkembang, sekaligus menawarkan pemetaan konseptual mengenai bagaimana populisme ekonomi membentuk relasi antara negara dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara sistematis bagaimana politik subsidi berperan dalam menciptakan, mempertahankan, atau justru mengurangi ketimpangan sosial di negara berkembang terutama di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan subsidi yang paling rentan terhadap politisasi serta mengusulkan kerangka konseptual yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perumusan kebijakan ekonomi populis di masa depan.

## 2. LANDASAN TEORI

### Konsep Subsidi dan Klasifikasinya

Subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi harga barang dan jasa tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. A'yun et al. (2024) menjelaskan bahwa subsidi energi mencakup berbagai bentuk bantuan pemerintah untuk komoditas strategis seperti BBM, LPG 3 kg, dan dukungan terhadap kendaraan listrik. Implementasi subsidi energi di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyalurannya, terutama terkait dengan ketepatan sasaran dan efisiensi distribusi.

Muharam et al. (2025) menganalisis subsidi LPG 3 kg dari perspektif sosiologi kebijakan, menunjukkan bahwa program subsidi ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di Jawa Barat. Klasifikasi subsidi dapat dibedakan berdasarkan objek (subsidi langsung dan tidak langsung), sektor (energi, pangan, pendidikan, kesehatan), dan sasaran penerima (universal atau targeted).

Secara umum, subsidi di negara berkembang memiliki beberapa tujuan utama: (1) menjaga stabilitas sosial dan politik, (2) mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta (3) menopang sektor-sektor strategis seperti energi dan pangan. Nainggolan et al. (2024) memberikan tinjauan komprehensif tentang kebijakan pemerintah terkait subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan gas bagi masyarakat prasejahtera. Studi ini menekankan pentingnya peninjauan ulang mekanisme subsidi untuk memastikan manfaat yang optimal bagi kelompok rentan. Dalam konteks ekonomi politik, subsidi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai alat politik yang dapat mempengaruhi dukungan publik terhadap pemerintah.

### Konsep Populisme Ekonomi

Populisme ekonomi merujuk pada pendekatan kebijakan yang menekankan kepentingan rakyat biasa dalam melawan elit ekonomi dan politik. Jubaedah dan Suryadi (2021) melakukan kajian sistematis tentang fenomena populisme di berbagai negara, mengidentifikasi perdebatan tentang hubungan antara populisme dan demokrasi. Kajian mereka menunjukkan bahwa populisme memiliki manifestasi yang beragam tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara.

Karakteristik utama kebijakan populis meliputi tiga hal:

1. **Orientasi pro-rakyat** yang menonjolkan narasi kesejahteraan sosial.
2. **Orientasi jangka pendek**, yang menitikberatkan pada manfaat langsung daripada dampak jangka panjang.
3. **Sikap anti-teknokrasi**, di mana kebijakan sering mengesampingkan masukan dari kalangan ahli atau lembaga ekonomi independen.

Populisme memengaruhi desain kebijakan subsidi dengan cara menggeser orientasi kebijakan dari rasionalitas ekonomi menuju legitimasi politik. Fahrezi et al. (2025) menganalisis populisme etno-religius dan politik segregasi dalam konteks rezim hibrida di Malaysia, menunjukkan bagaimana narasi populis digunakan untuk memobilisasi dukungan politik melalui identitas etnis dan agama. Studi kasus Malaysia ini memberikan perspektif penting tentang bagaimana populisme ekonomi dapat bersinggungan dengan dimensi etnis dan agama dalam membentuk kebijakan ekonomi.

Dalam praktiknya, populisme ekonomi sering ditandai dengan kebijakan redistribusi yang ekspansif, subsidi besar-besaran, dan retorika anti-elit. Namun, efektivitas jangka panjang dari kebijakan populis ini masih menjadi perdebatan akademis, terutama terkait dengan

keberlanjutan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Politik Subsidi**

Politik subsidi merupakan arena pertarungan kepentingan antara berbagai aktor politik dan ekonomi. Putri et al. (2025) mengkaji peran ekonomi politik subsidi energi, menyoroti dilema antara kepentingan elite dan kesejahteraan rakyat dalam formulasi kebijakan subsidi. Analisis mereka menunjukkan bahwa kebijakan subsidi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek daripada efisiensi ekonomi jangka panjang.

Putra et al. (2025) menganalisis ekonomi politik dalam penanganan ketimpangan ekonomi di Indonesia, menunjukkan kompleksitas interaksi antara kebijakan ekonomi, kepentingan politik, dan dinamika sosial. Dalam konteks ini, subsidi menjadi instrumen yang sensitif secara politik karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas.

Meytriana et al. (2025) menekankan peran ekonomi politik dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, di mana kebijakan subsidi menjadi salah satu instrumen utama. Politik subsidi tidak dapat dipisahkan dari konteks elektoral, di mana pemerintah sering kali menggunakan kebijakan subsidi untuk mempertahankan atau meningkatkan popularitas politik. Hal ini menciptakan dilema antara efisiensi ekonomi dan kepentingan politik, di mana rasionalisasi subsidi yang secara ekonomi masuk akal dapat menghadapi resistensi politik yang kuat.

### **Teori Ketimpangan Sosial**

Ketimpangan sosial merupakan fenomena multidimensional yang mencakup disparitas dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial. Choiri et al. (2025) menganalisis dampak pengangguran dan ketimpangan sosial terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan

politik di Indonesia, menunjukkan bahwa ketimpangan dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik.

Fajar et al. (2025) mengkaji ketimpangan sosial ekonomi dalam dinamika politik kontemporer, menyoroti bagaimana ketimpangan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses politik. Studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga fenomena politik yang memerlukan pendekatan komprehensif.

Watif et al. (2024) menganalisis ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan, mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang melanggengkan disparitas. Teori ketimpangan sosial mencakup berbagai perspektif, mulai dari pendekatan struktural yang menekankan sistem ekonomi hingga pendekatan institusional yang fokus pada kebijakan dan tata kelola. Dalam konteks negara berkembang, ketimpangan sering dikaitkan dengan warisan kolonial, struktur ekonomi yang tidak merata, dan lemahnya institusi redistributif.

### **Dampak Subsidi terhadap Ketimpangan: Tinjauan Empiris**

Hubungan antara subsidi dan ketimpangan sosial merupakan area penelitian yang kompleks dengan temuan empiris yang beragam. Komang dan Sudemen (2025) menganalisis pola intervensi pemerintah melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa efektivitas program tergantung pada desain dan implementasi kebijakan.

Putubasai dan Pratama (2024) mengkaji ekonomi politik global dan pengaruhnya terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, menyoroti bagaimana faktor global mempengaruhi kebijakan domestik. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik global yang lebih luas.

Solissa et al. (2025) menganalisis ekonomi politik pengentasan kemiskinan

dan peran kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran. Bukti empiris menunjukkan bahwa subsidi universal cenderung bersifat regresif karena kelompok berpenghasilan tinggi mengonsumsi lebih banyak barang bersubsidi. Sebaliknya, subsidi tertarget memiliki potensi lebih besar untuk mengurangi ketimpangan, meskipun menghadapi tantangan dalam identifikasi penerima dan biaya administratif.

Rofii (2024) melakukan studi komparatif lintas negara tentang interaksi dinamis antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa kualitas institusi demokratis mempengaruhi efektivitas kebijakan redistributif termasuk subsidi. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa dampak subsidi terhadap ketimpangan sangat bergantung pada jenis subsidi, mekanisme penyaluran, konteks sosial-ekonomi, dan komitmen politik pemerintah. Subsidi energi, misalnya, cenderung lebih regresif dibandingkan subsidi pangan atau pendidikan. Oleh karena itu, reformasi subsidi menjadi agenda penting dalam upaya mengurangi ketimpangan di negara berkembang.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *systematic literature review* (tinjauan sistematis). Metode *systematic review* dipilih untuk mengkaji secara komprehensif fenomena populisme dan ketimpangan sosial melalui analisis kebijakan subsidi di negara-negara berkembang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan dari berbagai studi yang telah dipublikasikan guna mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan pengetahuan terkait politik subsidi dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial dalam konteks ekonomi populis. Penelitian ini

bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka ekonomi politik untuk memahami interaksi antara kebijakan ekonomi, kepentingan politik, dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ekonomi politik diterapkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan subsidi dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari berbagai basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, SAGE Journals, SpringerLink, ScienceDirect, serta repositori jurnal nasional terindeks Sinta. Kriteria inklusi artikel yang dianalisis meliputi: (1) publikasi tahun 2021-2025; (2) menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris; (3) membahas kebijakan subsidi, populisme ekonomi, atau ketimpangan sosial; (4) fokus pada negara berkembang, terutama Indonesia; dan (5) menggunakan metodologi penelitian yang jelas dan valid.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui: identifikasi kata kunci dengan operator Boolean, pencarian literatur di database akademik, seleksi berdasarkan judul dan abstrak, pembacaan *full-text*, ekstraksi informasi penting, dan penilaian kualitas artikel berdasarkan validitas dan relevansi.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* dan *thematic analysis* dengan tahapan: (1) mengidentifikasi tema utama kebijakan subsidi dan dampak sosial-ekonomi; (2) mengelompokkan temuan berdasarkan karakteristik kebijakan, pengaruh ekonomi politik global, dampak pengangguran dan ketimpangan, serta efektivitas program; (3) menyusun sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola dan kontradiksi; (4) melakukan analisis komparatif lintas negara; dan (5) interpretasi kritis terhadap peran

kebijakan sosial dalam konteks politik dan ekonomi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Karakteristik Politik Subsidi di Negara Berkembang

###### 1. Pola Umum Pemberian Subsidi

Hasil analisis sistematis menunjukkan bahwa pola pemberian subsidi di negara berkembang cenderung bersifat universal dan tidak tertarget dengan baik. Berdasarkan temuan Komang & Sudemen (2025), intervensi pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan didominasi oleh pendekatan ekonomi ( $\pm 60\%$ ), dengan program subsidi seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, kajian A'yun et al. (2024) mengungkapkan bahwa subsidi energi, khususnya LPG 3 kg dan BBM, mengalami ketidaktepatan sasaran yang signifikan dan hanya 30% subsidi yang benar-benar menjangkau 40% rumah tangga berpendapatan terendah.

Pola serupa teridentifikasi dalam subsidi energi global. Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa subsidi BBM di Indonesia secara struktural memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok menengah-atas, dengan 89% subsidi solar dinikmati sektor bisnis dan hanya 11% mencapai rumah tangga, di mana 95% dari porsi rumah tangga tersebut justru dinikmati oleh kelompok mampu. Fenomena ini mencerminkan paradoks kebijakan subsidi yang seharusnya protektif terhadap masyarakat miskin, namun justru memperkuat dominasi ekonomi kelompok elite.

###### 2. Pengaruh Tekanan Elektoral dan Populisme

Dimensi populisme dalam politik subsidi terungkap sebagai faktor kunci dalam persistensi kebijakan yang tidak efisien. Jubaedah & Suryadi (2021) mengidentifikasi bahwa populisme bukan hanya anti-elitis tetapi juga bersifat anti-

pluralis, di mana kebijakan subsidi dijadikan instrumen legitimasi politik. Fahrezi et al. (2025) memperkuat temuan ini dalam konteks Malaysia, menunjukkan bahwa populisme etno-religius menggunakan subsidi sebagai alat mobilisasi politik dengan memanfaatkan narasi kerakyatan dalam balutan identitas etnis dan agama.

Tekanan elektoral menciptakan dilema politik bagi pembuat kebijakan. Nainggolan et al. (2024) menjelaskan bahwa meskipun subsidi BBM dan listrik membebani APBN hingga Rp 300 triliun (2022-2023), pemerintah enggan melakukan penyesuaian harga karena kekhawatiran terhadap gejolak sosial dan dampak elektoral. Hal ini sejalan dengan temuan Choiri et al. (2025) bahwa ketidaktepatan kebijakan subsidi dapat merusak legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya memperburuk polaritas sosial.

###### 3. Faktor Institusional: Governance, Regulasi Fiskal, dan Struktur Politik

Kapasitas institusional negara berkembang dalam mengelola subsidi menunjukkan kelemahan signifikan. Muhamam et al. (2025) mengidentifikasi tiga kategori kegagalan struktural dalam subsidi LPG: (1) desain kebijakan yang lemah dalam penentuan target penerima; (2) ketidakcocokan kuota dengan konsumsi aktual; dan (3) praktik patronase dalam distribusi yang melibatkan elite desa, pengecer, dan aparat.

Analisis tata kelola menunjukkan bahwa relasi kuasa lokal sangat menentukan efektivitas subsidi. Dalam konteks distribusi LPG 3 kg, aktor lokal seperti ketua RT/RW dan pengecer memainkan peran dominan dalam menentukan akses subsidi, mencerminkan praktik *clientelism* di mana akses terhadap sumber daya publik bergantung pada kedekatan sosial-politik dengan elite lokal (Muhamam et al., 2025). Fenomena ini

mengonfirmasi argumen Fischer (2003) bahwa kebijakan sering dijalankan bukan berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan relasi kuasa yang mencerminkan struktur sosial yang timpang.

Struktur politik rezim juga berpengaruh terhadap karakteristik subsidi. Fahrezi et al. (2025) menunjukkan bahwa Malaysia sebagai rezim hibrida (electoral autocracy) memelihara subsidi berbasis etnis sebagai strategi mempertahankan dominasi politik kelompok Melayu-Muslim. Konstitusi diskriminatif yang mengafirmasi hak istimewa Bumiputera menciptakan sistem subsidi yang secara struktural mengeksklusi kelompok minoritas, mengindikasikan bahwa arsitektur politik menentukan desain dan distribusi subsidi.

#### Dampak Subsidi terhadap Ketimpangan Sosial

##### 1. Bukti Empiris Dampak Progresif dan Regresif

Analisis sistematis mengungkap bahwa mayoritas subsidi di negara berkembang bersifat regresif. A'yun et al. (2024) melaporkan bahwa dalam konteks Indonesia, belanja subsidi energi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (koefisien 0,0679338;  $p=0,695>0,05$ ), sementara belanja kesehatan (koefisien -0,4840197;  $p=0,003<0,05$ ) dan pendidikan (koefisien -0,5302797;  $p=0,062<0,10$ ) menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Distribusi manfaat subsidi menunjukkan pola yang sangat timpang. Berdasarkan data efektivitas subsidi LPG 3 kg yang dikutip dari Effendi (2023) dalam A'yun et al. (2024), hanya 5,9% total subsidi yang dinikmati 10% kelompok termiskin, sementara 8,2% justru dinikmati 10% kelompok terkaya—mengonfirmasi sifat regresif subsidi energi. Pola serupa teridentifikasi dalam subsidi BBM, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani (2022) melaporkan bahwa

dari subsidi Pertalite yang mencapai rumah tangga, 80% dinikmati kelompok mampu dan hanya 20% mencapai rumah tangga miskin.

Temuan ini konsisten dengan studi Schaffitzel et al. (2020) di Ekuador yang menunjukkan bahwa subsidi energi seperti LPG dan diesel secara nominal lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya. Konsumsi energi yang tinggi dari rumah tangga mampu membuat mereka secara otomatis menjadi penerima manfaat dominan, menciptakan resistensi politik terhadap reformasi subsidi karena kelompok kaya memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat.

##### 2. Efek Subsidi Energi, Pangan, dan Transportasi terhadap Distribusi Pendapatan

Subsidi energi menunjukkan dampak paling regresif terhadap distribusi pendapatan. Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa ketika subsidi diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat konsumsi atau kemampuan ekonomi, kelompok dengan konsumsi tertinggi secara otomatis menjadi penerima manfaat terbesar. Konsekuensinya, alih-alih mengurangi ketimpangan sosial, subsidi energi justru memperparah ketimpangan dengan memberikan dukungan finansial secara tidak proporsional kepada kelompok yang tidak membutuhkan bantuan negara.

Analisis spasial menunjukkan bahwa kesenjangan akses subsidi antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperburuk ketimpangan regional. Muhamam et al. (2025) melaporkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah terpencil menghadapi harga LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat praktik distribusi berlapis dan lemahnya intervensi negara. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial dalam akses terhadap hak dasar energi dan memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok miskin yang justru menjadi prioritas kebijakan.

Dalam konteks subsidi pangan, meskipun program seperti BPNT dirancang untuk menjangkau kelompok miskin, Komang & Sudemen (2025) mengidentifikasi bahwa pro dan kontra terhadap bantuan sosial sebagian besar disebabkan oleh data penerima yang tidak akurat dan sistem pengumpulan data manual yang masih bergantung pada petugas lapangan. Ketidakakuratan ini menghasilkan inclusion error (kelompok tidak layak menerima bantuan) dan exclusion error (kelompok layak tidak terjangkau).

### 3. Peran Kebocoran Anggaran dan Salah Sasaran

Kebocoran anggaran dan salah sasaran merupakan karakteristik sistemik dalam implementasi subsidi. Nainggolan et al. (2024) mengungkap bahwa fenomena penimbunan dan distribusi ilegal BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak memenuhi syarat penerimaan subsidi menjadi praktik umum. Skandal korupsi 1-Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terkuak pada 2015 (Fahrezi et al., 2025) menunjukkan bagaimana subsidi dapat menjadi arena rent-seeking bagi elite politik.

Analisis Komang & Sudemen (2025) terhadap program Bantuan Kelangsungan Kehidupan (BKK) di Kabupaten Gunungkidul mengilustrasikan ineffektivitas subsidi: program hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan sebesar 1,02% pada 2013 dan 0,87% pada 2014. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh: (1) ketidaktepatan sasaran penerima manfaat; (2) ketidaktepatan penggunaan dana; (3) ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa upaya peningkatan keterampilan; dan (4) kurangnya sinergi aktor dalam implementasi.

Muharam et al. (2025) mengidentifikasi bahwa dinamika patronase menjadi faktor utama kebocoran subsidi. Dalam sistem distribusi LPG 3 kg, pengecer dapat memilih untuk mendistribusikan LPG

bersubsidi berdasarkan pertimbangan hubungan personal, kedekatan sosial, atau kedekatan politik. Hal ini menciptakan ketidakadilan distribusi di mana mereka yang lebih dekat dengan pengelola atau memiliki akses ke kekuasaan lokal cenderung lebih diuntungkan, sementara kelompok rumah tangga miskin tanpa jaringan sosial kuat kesulitan mendapatkan LPG dengan harga subsidi.

#### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Subsidi

##### 1. Kapasitas Negara dalam Targeting

Kapasitas targeting negara berkembang menunjukkan keterbatasan signifikan dalam mengidentifikasi dan menjangkau penerima manfaat yang tepat. A'yun et al. (2024) melaporkan bahwa hampir 30% dari subsidi LPG 3 kg tidak sampai pada keluarga miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan. Keterbatasan ini berakar pada tiga dimensi: (1) kapasitas teknis dalam pengumpulan dan verifikasi data; (2) kapasitas administratif dalam pendistribusian; dan (3) kapasitas politik dalam menegakkan aturan targeting.

Studi komparatif internasional memberikan pembelajaran penting. Sistem Direct Benefits Transfer for LPG (DBTL) di India menunjukkan bahwa integrasi data LPG dengan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, meskipun menghadapi tantangan keterlambatan pembayaran yang mempengaruhi rumah tangga miskin (A'yun et al., 2024). Sementara itu, El Salvador menggunakan teknologi mobile dengan ponsel khusus yang dibagikan kepada penjual LPG, memungkinkan informasi transaksi dikumpulkan langsung dalam database pusat dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan program hingga mencakup 74% rumah tangga pada 2015.

##### 2. Akurasi Database Kemiskinan

Akurasi database kemiskinan menjadi prasyarat fundamental bagi efektivitas targeting subsidi. Solissa et al.

(2025) mengidentifikasi bahwa keterbatasan data yang tidak akurat mengenai penerima bantuan sosial, ditambah dengan pengumpulan data yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan pro dan kontra dalam implementasi program bantuan. Sistem manual yang bergantung pada petugas untuk mencatat masyarakat yang membutuhkan rentan terhadap bias, manipulasi, dan human error.

Peru mengatasi tantangan ini melalui Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) yang menggunakan kriteria kelayakan berbasis data konsumsi listrik bulanan, pendapatan rumah tangga, dan jenis bangunan rumah. Pada 2014, FISE mencakup lebih dari 3,5 juta orang (hampir 710.000 rumah tangga) dengan dukungan kampanye komunikasi komprehensif (A'yun et al., 2024). Thailand mengadopsi pendekatan lebih ketat dengan pembatasan berdasarkan sambungan listrik maksimal 5 ampere dan konsumsi listrik rata-rata kurang dari 90 kWh per bulan, meskipun kompleksitas sistem ini menghasilkan tingkat partisipasi yang rendah.

### 3. Kualitas Tata Kelola dan Transparansi

Kualitas tata kelola menjadi determinan kritis efektivitas subsidi. Muharam et al. (2025) mengidentifikasi bahwa ketidakefisienan birokrasi dan lemahnya tata kelola memperburuk kebijakan subsidi melalui: (1) tumpang tindih regulasi; (2) ketidakakuratan data penerima; (3) lambatnya respon birokrasi terhadap dinamika lapangan; dan (4) resistensi birokrasi terhadap reformasi. Amelia et al. (2024) menyebutkan bahwa tantangan reformasi kebijakan publik di Indonesia berkaitan dengan resistensi birokrasi dan lemahnya kapasitas institusi.

Minimnya partisipasi publik dalam proses desain dan evaluasi kebijakan subsidi berkontribusi pada ketidakberdayaan masyarakat miskin. Muharam et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih sering

dijadikan objek kebijakan daripada subjek kebijakan, dan kebijakan dibuat tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan, desain, atau evaluasi. Fischer (2003) menekankan bahwa dalam banyak kebijakan publik, masyarakat diposisikan sebagai objek dari kebijakan yang dianggap sudah "baik" untuk mereka, tanpa mempertimbangkan pandangan atau kebutuhan nyata mereka.

Transparansi distribusi subsidi juga menjadi masalah serius. Nainggolan et al. (2024) melaporkan bahwa distribusi subsidi LPG 3 kg tidak langsung disalurkan oleh pemerintah, melainkan melalui saluran distribusi yang berada di bawah kendali aktor lokal. Kurangnya transparansi dalam mekanisme distribusi ini menciptakan ruang bagi praktik rent-seeking dan patronase yang merugikan kelompok penerima manfaat yang seharusnya.

### 4. Resistensi Politik dan Kepentingan Kelompok

Resistensi politik terhadap reformasi subsidi bersumber dari dua kelompok utama: elite politik yang memanfaatkan subsidi untuk legitimasi kekuasaan, dan kelompok penerima manfaat yang memiliki kekuatan politik. Putri et al. (2025) menjelaskan bahwa resistensi politik terhadap reformasi subsidi energi terjadi karena kelompok kaya cenderung memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup kuat untuk mempertahankan skema yang menguntungkan mereka.

Fahrezi et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks Malaysia, koalisi Muafakat Nasional (UMNO-PAS) menggunakan isu lenyapnya kedudukan politik Melayu untuk melawan reformasi subsidi yang dilakukan pemerintah Pakatan Harapan. Mereka mengklaim bahwa hak istimewa Melayu direnggut dengan berkuasanya koalisi PH, memanfaatkan sentimen etno-religius untuk mempertahankan sistem subsidi yang diskriminatif namun menguntungkan basis konstituen mereka.

Jubaedah & Suryadi (2021) mengidentifikasi bahwa populisme menciptakan dilema bagi reformasi subsidi. Politisi populis menggunakan subsidi sebagai alat untuk menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil, meskipun dalam kenyataannya kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik daripada substantif. Narasi "subsidi demi rakyat" digunakan untuk memperoleh legitimasi tanpa memperhatikan efektivitas penyaluran dan dampak jangka panjang, menjebak negara dalam kebijakan jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

### **Ekonomi Politik Reformasi Subsidi**

#### **1. Hambatan Politik dalam Mengurangi Subsidi Universal**

Hambatan politik terhadap reformasi subsidi universal bersifat multidimensional dan deeply embedded dalam struktur kekuasaan. Nainggolan et al. (2024) menjelaskan bahwa ketika harga energi dunia meningkat, beban fiskal negara ikut melonjak akibat tekanan untuk mempertahankan subsidi. Dengan volume LPG subsidi sebesar 8 juta MT, anggaran subsidi LPG 2022 mencapai Rp 125 triliun, ditambah subsidi BBM yang dapat mencapai Rp 300 triliun, total beban subsidi energi dapat menghabiskan ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk program produktif dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Putubasai & Wijaya (2024) mengidentifikasi bahwa ketergantungan pada pinjaman dari IMF dan Bank Dunia pada masa krisis ekonomi telah membawa dampak jangka panjang pada kebijakan fiskal Indonesia, termasuk pembatasan subsidi yang berdampak pada masyarakat miskin. Kondisi ini menciptakan trade-off politik antara kemandirian fiskal dan perlindungan sosial, di mana pemerintah harus memilih antara memenuhi kewajiban kepada kreditor internasional atau mempertahankan subsidi yang secara politis populer.

Resistensi terhadap reformasi subsidi juga bersumber dari kekhawatiran

terhadap instabilitas sosial. Choiri et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sering berujung pada protes sosial dan ketidakstabilan politik. Kesenjangan yang lebar cenderung menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi investasi serta pertumbuhan ekonomi. Pengalaman historis kerusuhan akibat kenaikan harga BBM membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam melakukan penyesuaian harga, bahkan ketika subsidi jelas-jelas tidak tepat sasaran.

#### **2. Peran Elite Politik dan Kelompok Kepentingan**

Elite politik memainkan peran sentral dalam mempertahankan status quo subsidi yang tidak efisien. Fahrezi et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam sistem politik Malaysia, UMNO sebagai partai dominan memanfaatkan subsidi sebagai instrumen untuk memelihara legitimasi kekuasaan dan mendorong ideologi Ketuanan Melayu. Batasan antara hak dan kewajiban partai politik menjadi kabur, dengan UMNO terlibat dalam kontrak kenegaraan, pinjaman, dan aset pribadi yang sejatinya bukan kewenangan partai politik.

Dalam konteks Indonesia, Meytriana et al. (2025) mengidentifikasi bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi kemiskinan termasuk akses terhadap kekuasaan dan struktur politik yang mengatur kemampuan seseorang untuk mencapai dan memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan ekonomi dialami karena adanya kemiskinan struktural dan politis—individu yang miskin tidak memiliki sarana atau kekuatan politik untuk terlibat dalam proses politik, sehingga menempati posisi terendah dalam struktur sosial.

Muharam et al. (2025) mengungkap bahwa dalam distribusi subsidi LPG, elite desa dan pengecer memainkan peran dominan dalam menentukan akses

subsidi. Mereka dapat mempengaruhi siapa yang mendapat prioritas berdasarkan kedekatan sosial atau politik. Sistem patronase ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pihak yang berkuasa dengan kelompok tertentu, di mana akses terhadap subsidi energi diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dengan aktor yang mengatur distribusi.

### 3. Strategi Kompensasi Sosial dan Mitigasi Risiko Politik

Pembelajaran dari reformasi subsidi internasional menunjukkan pentingnya strategi kompensasi sosial. Schaffitzel et al. (2020) menunjukkan bahwa di Ekuador, bantuan tunai sebagai kompensasi pencabutan subsidi justru memberikan manfaat pendapatan bersih bagi kelompok termiskin. Temuan ini membuktikan bahwa keberpihakan kepada masyarakat miskin tidak harus dilakukan melalui subsidi harga energi, melainkan melalui intervensi yang lebih langsung dan terukur.

India mengimplementasikan program "Give it Up!" untuk mendorong rumah tangga mampu berhenti membeli LPG bersubsidi, meningkatkan efisiensi subsidi. Kampanye ini dikombinasikan dengan sistem DBTL yang memberikan kompensasi melalui rekening bank, mengurangi korupsi dan kebocoran (A'yun et al., 2024). Meskipun menghadapi tantangan integrasi data dan keterlambatan pembayaran, pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi subsidi dapat diterima secara politik jika disertai dengan mekanisme kompensasi yang kredibel.

Meksiko menempuh jalur berbeda dengan menaikkan harga LPG secara bertahap tanpa program kesejahteraan sosial khusus, mengandalkan sistem jaring pengaman sosial yang sudah ada seperti program Oportunidades. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dapat memfasilitasi reformasi subsidi, meskipun tetap

menimbulkan tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin dalam jangka pendek (A'yun et al., 2024).

A'yun et al. (2024) merekomendasikan bahwa transisi menuju sumber energi alternatif harus didukung oleh kebijakan yang tidak hanya mengurangi subsidi LPG secara bertahap, tetapi juga menyediakan pelatihan, informasi, dan insentif untuk mendorong peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan semacam ini harus memperhitungkan dimensi sosial agar tidak memperburuk ketimpangan atau menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat yang paling rentan.

### Alternatif dan Inovasi Kebijakan

#### 1. Reformasi Subsidi Berbasis Data (Digital Targeting)

Pemanfaatan teknologi digital dalam targeting subsidi menunjukkan potensi signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi kebocoran. A'yun et al. (2024) melaporkan bahwa TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) telah merancang rencana membatasi penerima manfaat subsidi LPG berdasarkan data dari basis data subsidi listrik, serta menguji teknologi biometrik dalam beberapa proyek uji coba yang aman dan lancar.

El Salvador menunjukkan keberhasilan implementasi sistem berbasis teknologi mobile, di mana subsidi dibayarkan langsung kepada penjual LPG ketika penerima membeli dengan menunjukkan identitas dan memasukkan nomor identifikasi pribadi di ponsel khusus. Teknologi ini memungkinkan informasi tentang semua transaksi dikumpulkan secara langsung dalam database pusat, meningkatkan kemampuan pelaksanaan program hingga mencakup 74% rumah tangga pada 2015 (A'yun et al., 2024).

Aplikasi MyPertamina di Indonesia dirancang sebagai poin utama untuk

pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan tujuan distribusi subsidi tepat sasaran (Nainggolan et al., 2024). Meskipun menghadapi kendala teknis, penerapan pemantauan subsidi BBM dengan bantuan teknologi ini menjadi langkah awal menuju sistem subsidi yang lebih terarah. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa sejak 1 Juli 2022, uji coba pendistribusian subsidi Pertalite dan Solar dilakukan terhadap pengguna yang terdaftar di sistem MyPertamina.

## 2. Bantuan Tunai Langsung

Program bantuan tunai langsung (cash transfer) menunjukkan efektivitas lebih tinggi dibandingkan subsidi harga dalam mengurangi kemiskinan. A'yun et al. (2024) melaporkan bahwa belanja kesehatan (koefisien -0,4840197;  $p=0,003$ ) dan pendidikan (koefisien -0,5302797;  $p=0,062$ ) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sementara belanja subsidi energi tidak menunjukkan pengaruh signifikan (koefisien 0,0679338;  $p=0,695$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah melalui pengeluaran di sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk bantuan tunai langsung, lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan subsidi energi.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia menunjukkan karakteristik yang lebih progresif dibandingkan subsidi energi, meskipun masih menghadapi tantangan inclusion error (Putubasai & Wijaya, 2024). PKH memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anak bersekolah atau menjaga kesehatan keluarga, yang bertujuan memutus siklus kemiskinan antargenerasi (Komang & Sudemen, 2025).

Studi Schaffitzel et al. (2020) di Ekuador menunjukkan bahwa bantuan tunai sebagai kompensasi pencabutan subsidi justru memberikan manfaat pendapatan bersih bagi kelompok

termiskin. Skema ini lebih tepat sasaran dibanding subsidi terbuka karena benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Temuan ini membuktikan bahwa keberpihakan kepada masyarakat miskin tidak harus dilakukan melalui subsidi harga energi, melainkan melalui intervensi yang lebih langsung dan terukur.

## 3. Subsidi Bersyarat (Conditional Cash Transfers)

Program subsidi bersyarat menggabungkan bantuan tunai dengan persyaratan pemenuhan kondisi tertentu, menciptakan insentif untuk investasi modal manusia. Komang & Sudemen (2025) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah contohnya intervensi yang bertujuan memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin dengan persyaratan seperti memastikan anak-anak bersekolah atau menjaga kesehatan keluarga, bertujuan memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

Peru mengimplementasikan Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) dengan kriteria kelayakan yang jelas berdasarkan konsumsi listrik bulanan rata-rata, pendapatan rumah tangga, jenis bangunan rumah, dan indikator lainnya. Voucher bulanan senilai 16 soles diberikan melalui kode numerik pada tagihan listrik dan dapat ditukarkan melalui ponsel penerima, mencakup lebih dari 3,5 juta orang (hampir 710.000 rumah tangga) pada 2014 (A'yun et al., 2024).

Thailand mengadopsi pendekatan lebih ketat dengan pembatasan berdasarkan sambungan listrik maksimal 5 ampere dan konsumsi listrik rata-rata kurang dari 90 kWh per bulan, dengan konsumsi LPG dibatasi 18 kg setiap tiga bulan. Sistem berbasis SMS digunakan untuk verifikasi pembelian. Meskipun pembatasan ketat memastikan hanya kelompok target yang menerima subsidi, kompleksitas sistem menghasilkan tingkat partisipasi yang rendah, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara

ketepatan targeting dan aksesibilitas (A'yun et al., 2024).

#### 4. Integrasi Teknologi untuk Meminimalkan Kebocoran

Integrasi teknologi informasi menjadi kunci dalam meminimalkan kebocoran dan meningkatkan transparansi distribusi subsidi. India mengintegrasikan data LPG dengan sistem perbankan melalui Direct Benefits Transfer for LPG (DBTL), di mana konsumen membayar harga pasar untuk LPG dan menerima kompensasi melalui rekening bank mereka. Sistem ini bertujuan mengurangi korupsi dan penggunaan LPG yang tidak tepat sasaran (A'yun et al., 2024).

Muharam et al. (2025) merekomendasikan penggunaan teknologi informasi dan data terpadu untuk memastikan subsidi benar-benar menyasar kelompok rentan. Reformasi ini harus didorong oleh komitmen politik yang kuat agar kebijakan subsidi dapat menjadi instrumen ke adilan sosial, bukan sekadar alat populisme politik yang memperkuat dominasi kelas atas.

A'yun et al. (2024) menyarankan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data, dengan analisis data kemiskinan dan pemetaan kerentanan sosial untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan intervensi prioritas. Penggunaan teknologi untuk pemecahan masalah, seperti sistem informasi dan komunikasi, dapat memperbaiki layanan publik, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dan program bantuan yang tersedia.

Solissa et al. (2025) merekomendasikan penguatan sistem verifikasi penerima manfaat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan social enterprise untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan kolaborasi multisektor yang didukung data kuantitatif yang akurat, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

#### 5. KESIMPULAN

Kebijakan subsidi di negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan kekuasaan. Meski dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan, praktik pelaksanaannya sering kali memperparah ketimpangan sosial akibat distribusi manfaat yang tidak merata dan politisasi program subsidi. Kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran, ditambah dengan faktor global dan institusi demokratis yang berkualitas, turut mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, tantangan dalam identifikasi penerima manfaat dan biaya administrasi yang tinggi menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program subsidi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berbasis data yang akurat dan transparan serta kolaborasi multisektor untuk memastikan redistribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan subsidi dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Kurnia Sobana Putra, Yusuf Vedi Velandi, & Ranga Rangga. (2025). Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 19–25.
- A'yun, Q., Akhmad, M. H., & Wati, E. N. (2024). Subsidi Energi: Tantangan Penyaluran BBM, LPG 3 kg, serta Dukungan Terhadap Kendaraan Listrik. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 173-188.

- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin, A. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947-955.
- Fahrezi, M., Sugiarto, B., & Sobandi, K. (2025). Populisme Etno-Religius, Politik Segregasi, dan Rezim Hibrida: Kasus Malaysia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(01), 56-66.
- Fajar, M., Kamaruddin, S., & Awaru, A. O. T. (2025). Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 5(2).36
- Jubaedah, E., & Suryadi, K. (2021). Fenomena Populisme di Berbagai Negara dalam Sebuah Perdebatan Demokrasi: Kajian Systematis Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Komang, E. M., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 9(1), 68-77.
- Meytriana, A., Azahra, G. M., Khasanah, K. M., Artika, P. A., & Hotman, H. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(2), 478-493.
- Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). SUBSIDI LPG 3 KG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KEBIJAKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN LINGKUNGAN DI JAWA BARAT. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(2), 191-203.
- Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Gas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 114-130.
- Putri, W., Fadhillah, S. N., & Monika, D. (2025). Peran Ekonomi Politik Subsidi Energi: Antara Kepentingan Elite Dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(2), 331-338.
- Putubasai, E., & Pratama, D. R. (2024). EKONOMI POLITIK GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 9(2), 53-58.
- Rofii, M. S. (2024). Interaksi Dinamis antara Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Lintas Negara. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2419-2426.
- Solissa, A. A., Sadewi, M. P., Aswalida, D., & Candra, M. (2025). Ekonomi Politik Pengentasan Kemiskinan: Peran Kebijakan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary*, 2(1).
- Watif, M., JT, A. R., Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536-547.